



*Working
Paper*

MENGANDALKAN BUKTI

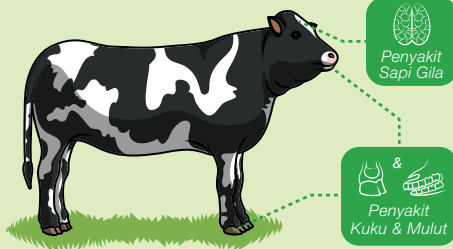
Pembelajaran dari Kementerian
Lingkungan, Pangan dan Urusan
Pedesaan (DEFRA) Inggris



DEFRA telah menerapkan sebuah pendekatan sistematis guna meningkatkan kemampuan mencari dan memanfaatkan bukti sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan.

Mengapa Bukti adalah Dasar Penting Bagi Penyusunan Kebijakan?

➔ Perumusan kebijakan untuk penanganan krisis *Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)* atau 'penyakit sapi gila' di tahun 1990an dan epidemik Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada tahun 2000an tidak didukung oleh bukti yang memadai sehingga kebijakan tersebut tidak efisien dan efektif.



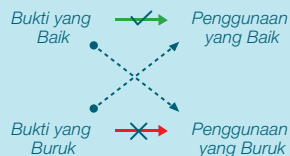
APA LANGKAH DEFRA BERIKUTNYA?

➔ Pada tahun 2004, DEFRA menerapkan Strategi Investasi Berbasis Bukti (*Evidence Investment Strategy_EIS*). Strategi ini merupakan inovasi untuk mendapatkan pemahaman kebutuhan bagi pemerintah dalam menerapkan pendekatan 'Kebijakan berdasarkan Bukti'. EIS telah dilaksanakan tiga tahap: 2006 – 2010 (tahap pertama), 2010-2013 (tahap kedua), dan 2014-2018 (tahap ketiga).

Apakah Definisi Bukti?

1. Bukti telah didefinisikan sebagai 'informasi yang dapat dipercaya dan bersifat akurat yang dapat digunakan DEFRA untuk mendukung keputusan yang tepat dalam mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan'.
2. Bukti tersebut disampaikan oleh sumber-sumber eksternal dan internal, dan termasuk analisis informasi yang berasal dari kementerian sendiri maupun ahli dari luar.
3. Ini termasuk fakta, risiko, ketidakpastian, ambiguitas, dan analisis batas terhadap pengetahuan menyangkut situasi saat ini dan masa depan, dan kelangsungan pilihan alternatif untuk mencari solusi inovatif di masa depan.

Bukti dan Pemrosesan Bukti



Kualitas pemrosesan bukti juga sama pentingnya dengan kualitas bukti itu sendiri

DEFRA tidak memiliki basis ilmu sosial yang kuat seperti dalam penanganan kasus BSE dan PMK. Karena itu, EIS tahap pertama melibatkan berbagai perspektif lintas ilmu seperti ekonomi, alam, sosial dan statistik. Tahap ini berhasil mencatat bahwa ruang lingkup ‘bukti’ lebih luas dari penelitian. Keterlibatan dan pengetahuan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya merupakan bagian dari dasar bukti.

Tiga langkah yang dilalui EIS pada tahap pertama:

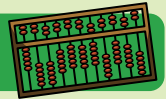
1

Menyusun beberapa bukti/pengetahuan yang dibutuhkan untuk masing-masing pencapaian strategis.



2

Mengkaji alokasi anggaran penelitian untuk memastikan hal tersebut mendukung prioritas strategis DEFRA.



3

Merangkul beberapa bukti yang dibutuhkan kemudian diserahkan kepada para pemangku kepentingan.



➔ Pernyataan bukti disusun melalui serangkaian diskusi dan lokakarya, kemudian tim penasehat kebijakan dan pengetahuan menetapkan beberapa hal:

3

Bukti dan pengetahuan apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan setiap capaian, dan untuk mengelompokkan kebutuhan tersebut dengan tepat.

1

Hasil-hasil strategis dan semua target yang terkait.

2

Hasil-hasil untuk suatu kebijakan yang bersifat individual.

4

Bagaimana kumpulan kebutuhan akan bukti tersebut diprioritaskan dan apa saja manfaat/nilainya bagi DEFRA.

5

Sumber daya apa saja yang diperlukan untuk mendanai beberapa kebutuhan akan bukti tersebut.

Tahap ini mengidentifikasi tentang pentingnya penggunaan jenis bukti yang berbeda dan tidak hanya riset ilmiah, misal: peneliti opini dan sosial, analisis lintas ilmu, dan penelitian pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta teknis.

Di tahap ini para peneliti yang berasal dari ilmu sosial semakin dilibatkan sehingga berhasil memberi kejelasan tentang prioritas yang lebih fokus pada risiko dan ketidakpastian pada bukti awal. Beberapa langkah penting yang telah dilakukan adalah:

A EIS secara eksplisit dikaitkan dengan proses perencanaan DEFRA. Setiap rencana kerja merinci empat sampai lima kebijakan dan semua bukti pendukung yang dibutuhkan.

B Ada pengertian yang lebih jelas tentang bagaimana menyertakan bukti ke dalam kebijakan. Sebelum EIS pertama, anggaran ilmu pengetahuan dan anggaran kebijakan dipisahkan.

Di tahap ini, EIS membedakan dua jenis kebijakan, yaitu: a) kebijakan yang matang dengan dasar bukti yang baik yang hanya perlu diperbaharui; dan b) bidang kebijakan baru dimana usaha dan kerja keras dibutuhkan untuk menyatukan bukti yang ada sekaligus memperoleh bukti-bukti yang baru. Penggabungan anggaran bukti (penelitian) dengan anggaran program kebijakan berguna untuk meningkatkan fleksibilitas bagi bidang yang didanai.

Kebijakan juga harus mencakup disiplin ilmu-ilmu lain; termasuk berbagai jenis bukti yang sebelumnya belum diberi bobot yang cukup, meliputi:

**Ilmu
Ekonomi**



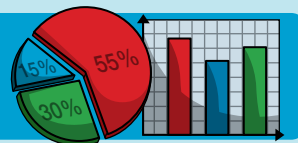
**Penelitian
Sosial**



Ilmu Alam
(Termasuk Teknik
dan Teknologi)



Statistik



Tiga langkah utama menjadi hal yang dipertimbangkan:

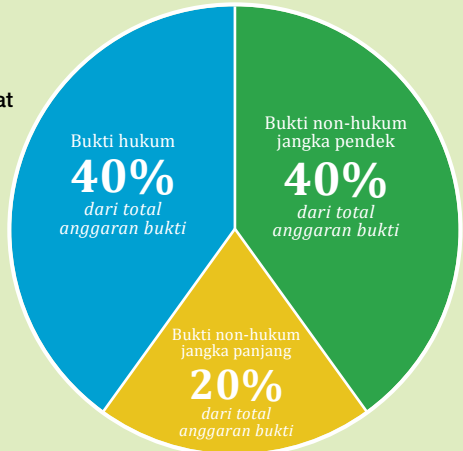
A Menggambarkan kondisi saat ini sebagai fondasi EIS, antara lain: menentukan bukti terdiri dari apa saja, menentukan berapa banyak bukti yang diperoleh dari sumber internal dan eksternal, menentukan berapa banyak bukti di setiap kebijakan, dan mengaitkan pengadaan bukti dengan rencana kerja.

B Memprioritaskan kebutuhan atas bukti untuk masa depan, dan menggolongkan bukti menjadi tiga jenis kategori berdasarkan bagaimana bukti itu akan dimanfaatkan (mengingat bahwa beberapa bidang kebijakan akan menggunakan ketiganya secara bersamaan):

■ Kebutuhan akan bukti hukum, dialokasikan dari program untuk lembaga tertentu yang akan melakukan kegiatan monitoring;

■ Kebutuhan bukti non-hukum jangka pendek untuk merespon prioritas kementerian. Ini cenderung melibatkan pendekatan yang lebih terapan dan riset sekunder; dan

■ Kebutuhan bukti non-hukum jangka panjang untuk tujuan yang lebih strategis, bekerjasama dengan Dewan Riset atas dasar penelitian akademis yang lebih mendasar dan pemindaian cakrawala.



Pembagian Anggaran

C Mengalokasikan anggaran. Dengan mempertimbangkan berkurangnya anggaran, maka perlu ada wacana apakah DEFRA akan ‘membuat atau membeli’ bukti? Apakah proses pencarian bukti dikerjakan sendiri atau adanya kerjasama dengan pihak lain?

Meneliti Bukti Secara Mandiri



Pilihan DEFRA
Untuk Mendapatkan Bukti



Membeli Bukti Dari Pihak Lain

PEMBELAJARAN

Hal-hal yang tidak berubah sejak EIS Pertama:

- 1 Prinsip-prinsip**
 - A. Menempatkan kebijakan sebagai prioritas**

Pengelolaan dasar bukti menjadi bagian integral dari proses penyusunan kebijakan.
 - B. Menggunakan definisi yang luas dari bukti yang kuat**

Bukti dari sisi evaluasi, monitoring, pengawasan, pengetahuan masyarakat/pemangku kepentingan dan berasal dari berbagai disiplin berbasis penelitian formal.
 - C. Fokus investasi pada bukti untuk prioritas jangka panjang**

Membawa manfaat dan nilai dalam jangka panjang dengan membantu mencari peluang, risiko dan ketidakpastian.
 - D. Mendapatkan pembelajaran/hikmah dari bukti yang ada**
- 2 Pendekatan berbasis seluruh organisasi**

EIS telah melibatkan seluruh kementerian dalam merencanakan investasi pengetahuan dan bukti.
- 3 Menghubungkan EIS dengan perencanaan kerja**

Hubungan yang jelas antara anggaran berbasis pengetahuan dan anggaran program.
- 4 Belajar dari masing-masing EIS**

Mempertahankan pegawai yang telah berpengalaman dalam melaksanakan EIS untuk menyempurnakan proses pelaksanaan dan menjaga keberlanjutan.

Apa saja yang telah berubah:

- 1 Penggunaan konsultan luar DEFRA**

Sumbangan pemikiran di tahap awal EIS dari pihak luar yang akan membantu menyusun rencana dan anggaran ke depan.
- 2 Kejelasan atas 'bukti untuk kebijakan'**

Berasal dari data statistik, bukti penelitian, pengetahuan masyarakat/pemangku kepentingan, dan hasil monitoring evaluasi.
- 3 Isu internal organisasi**

Memahami penyusunan dan pengelolaan keseimbangan bukti berkualitas tinggi dan dianggap relevan dengan perubahan prioritas kebijakan.
- 4 Membuat dasar bukti transparan untuk internal dan eksternal**

Keterbukaan untuk dasar bukti penyusunan kebijakan melalui konsultasi dengan tujuan untuk menentukan tujuan, struktur dan strategi di masa depan.

Knowledge Sector Initiative (KSI) merupakan komitmen bersama pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia melalui penerapan kebijakan publik yang lebih berkualitas yang menggunakan penelitian, analisis, dan bukti secara lebih baik.